

# Perkembangan Kebudayaan Masyarakat dalam Pengamalan Pancasila:

## Tantangan Ideologi Pancasila di Masa-masa Mendatang\*

A.M.W. PRANARKA

### PENDAHULUAN

Berbicara mengenai tantangan ideologi Pancasila di masa-masa mendatang dalam kaitannya dengan usaha bersama menelaah perjalanan bangsa Indonesia selama dua dasawarsa ini, dengan memahami situasi kehidupan kebangsaan kita saat ini dan membangun wawasan ke depan, membuka cakrawala meneruskan perjalanan sejarah bangsa Indonesia di masa mendatang, meminta kita untuk sejenak melihat kembali lembaran-lembaran awal Orde Baru, khususnya yang menyangkut soal ideologi.

Ideologi merupakan hal yang amat mewarnai Orde Baru, baik pada awal permulaannya maupun di dalam perjalanan selanjutnya.

Sekurang-kurangnya ada dua peristiwa penting yang dapat kita angkat dalam kaitannya dengan ideologi ini. *Pertama*, Simposium Kebangkitan Semangat '66 Menjelajah Tracee Baru, diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 6 Mei 1966 sampai 9 Mei 1966 di Jakarta. *Kedua*, pidato Pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto di depan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 16 Agustus 1967.

Masalah ideologi merupakan bagian penting yang dibahas di dalam Simposium Menjelajah Tracee Baru Tahun 1966.

Khusus mengenai bidang Ideologi yang memusatkan pembahasan mengenai Pancasila, Prof. Dr. Slamet Iman Santosa antara lain mengemukakan 3 konstataasi berikut ini:

\*Makalah disampaikan pada Simposium 20 Tahun Orde Baru, 4 Maret 1986, di Jakarta.

- a. Pancasila: satu problem untuk Indonesia yang fundamental dan luas.
- b. Sejati: jadi pernah tidak sejati -- palsu.
- c. Kembali: jadi pernah meninggalkan.

Di dalam konstataasi ini menjadi tampak betapa problem ideologi itu terkait tidak hanya dengan konteks aktual sosio-politik tahun 1966, tetapi juga konteks historis sebelumnya dan konteks historis di masa depannya.

Di dalam pengertian ini Orde Baru menjadi suatu gerakan *Renouvellement* akan tetapi sekaligus juga gerakan *Resourcement*.

Di dalam kata-kata Dr. Ali Wardhana pada waktu itu, maka Tracee baru itu tumbuh untuk memungkinkan penjelasan kebangkitan Semangat '66 ke segala bidang, baik bidang ideologi, bidang politik, bidang sosial ekonomi maupun bidang budaya, sehingga dengan demikian energinya yang meluap-luap itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pembinaan Bangsa dan Negara di atas landasan Negara Pancasila dan UUD 1945 yang murni.

Dengan dipusatkannya pembahasan mengenai Pancasila sebagai satu-satunya substansi pemikiran, sesungguhnya awal Orde Baru itu pun telah mempertegas kedudukan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional kita.

Penegasan kenegaraan wawasan Orde Baru, terutama yang berkenaan dengan Pancasila itu, terungkap di dalam pidato Pejabat Presiden Jenderal Soeharto pada waktu itu di hadapan Sidang Paripurna DPR-GR pada tanggal 16 Agustus 1969.

Dalam kesempatan itu Pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto mengemukakan penegasan-penegasan sebagai berikut:

Orde Baru tidak lain adalah tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945...

Mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, itulah fungsi dan tujuan Orde Baru...

Pancasila yang merupakan keluhuran pandangan hidup bangsa itu, mencerminkan nilai-nilai pokok pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, dan merupakan kepribadian Indonesia...

Pancasila selanjutnya dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara UUD 1945 merupakan pencerminan Pancasila sebagai dasar negara: Pokok-pokok Pikiran tentang negara dan sistem pemerintahan jelas langsung bersumber dan merupakan pelaksanaan Pancasila. Pancasila dan UUD 1945 karena itu merupakan satu rangkaian.

## DEVIASI-DEVIASI DAN PENATAAN-PENATAAN

Di dalam Simposium Kebangkitan Semangat '66 tersebut almarhum Prof. Dr. N. Drijarkara mengemukakan 3 pokok pemikiran, yaitu: (1) mengenai ter-

jadinya deviasi-deviasi tematis maupun deviasi-deviasi operatif terhadap Pancasila; (2) mengenai penataan Pancasila baik sebagai kategori tematik maupun kategori imperatif; dan (3) mengenai pengembangan kekuatan-kekuatan Pancasila. Mengakhiri pandangan yang dikemukakan itu ada dikemukakan berikut ini: Pancasila adalah soal keyakinan dan pendirian yang asasi. Karena itu tidak akan bisa tertanam dalam jiwa kita, jika kita masing-masing tidak berjuang, baik untuk masyarakat dan negara, maupun untuk tiap-tiap individu. Penanaman Pancasila adalah usaha yang harus berjalan terus-menerus, tak ada berhentinya. Tak seorang pun akan menjadi Pancasilais, kalau dia tidak membuat dirinya Pancasilais. Dan negara kita tidak akan menjadi negara Pancasila jika kita tidak membuatnya terus-menerus.

Dalam pada itu Drs. Fuad Hassan pada waktu itu -- sekarang Prof. Dr. Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia -- mengemukakan bahwa salah satu sumber deviasi tersebut adalah suasana "pluri-interpretabilitas Pancasila," yang mengakibatkan terjadinya semantic confusions, kekaburan pengertian dan tafsir mengenai Pancasila itu. Dikemukakan pula bahwa sampai saat itu kita bangsa Indonesia belum mempunyai gambaran yang jelas tentang Pancasila sebagai ideologi yang dapat dikonkretkan di dalam kehidupan sehari-hari. "Pancasila," demikian dikatakan oleh Drs. Fuad Hassan "sampai saat ini belum operasional." "Kita belum memiliki suatu tafsiran perincian tentang Pancasila sebagai falsafah, apalagi sebagai suatu *operational ideology*." Pendekatan mendasar terhadap Pancasila adalah amat penting karena "introspeksi dan koreksi yang fundamental harus dilakukan dalam bidang yang fundamental pula, yaitu bidang mental dan ideologi."

David Napitupulu sebagai salah seorang pembicara di dalam simposium tersebut mengemukakan pula bahwa "perjuangan untuk kembali ke UUD 1945 dalam segala aspeknya masih berlangsung terus, baik segi politis, segi yuridis, segi struktural maupun segi ideologinya."

Sementara itu H.A. Timur Djaelani MA, pada simposium tersebut mengemukakan diperlukannya suatu pendekatan yang disebut sebagai "theological approach" terhadap Pancasila, satu dan lain hal disebabkan karena sila pertama dari Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila dua dasawarsa kemudian kita simak kembali lembaran dan gagasan-gagasan tersebut, maka terasalah betapa di dalamnya telah terkandung segala problem maupun prospek mendasar berkenaan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa maupun ideologi nasional kita.

## JALAN-JALAN PENATAAN

Dua dasawarsa perjalanan Orde Baru ternyata amat diwarnai oleh usaha-usaha besar di dalam membangun penataan-penataan bidang ideologi. Seluruh proses penataan bidang ideologi tersebut mencakup dua pendekatan yang saling melengkapi dan berkesinambungan; *pertama*, "pendekatan pengamanan," *kedua*, "pendekatan penghayatan dan pengamalan." Kedua pendekatan ini mempunyai fokus yang berbeda, namun saling bertautan yang satu dengan yang lain. Pendekatan pertama bagaikan *via negativa*, yaitu menghalaukan segala penyimpangan-penyimpangan baik yang bersifat tematik maupun yang bersifat operatif. Pendekatan kedua adalah bagaikan *via positiva* dengan memperkuat pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila, baik sebagai kategori tematik maupun sebagai kategori operatif.

Oleh karena semuanya harus dilaksanakan melalui jalan konstitusional, maka penataan-penataan tersebut pun pertama-tama dan terutama terjadi di bidang politik kenegaraan. Hal ini tidaklah mengherankan karena di masa-masa pra Orde Baru, kehidupan politik kenegaraan itu pun merupakan medan utama dan terutama dari terjadinya pertarungan politik dan ideologi yang tidak kunjung selesai, yang dampak dan implikasinya adalah terjadinya deviasi-deviasi terhadap Pancasila maupun UUD 1945.

Itulah sebabnya maka jalan penataan tersebut pertama-tama tampak di dalam penataan suprastruktur politik, namun kemudian menjangkau pula kepada penataan infrastruktur politik dan kultur politik kebangsaan kita.

Setapak demi setapak namun secara berkesinambungan dan saling berkaitan, baik melalui jalan pengamanan (*via negativa*) maupun jalan pemahaman, penghayatan dan pengamalan (*via positiva*) terjadilah proses penataan itu.

Dan di dalam perjalanan ini pun dapat diangkat jawaban-jawaban yang sifatnya mendasar terhadap pemikiran-pemikiran mendasar yang diungkapkan di dalam Simposium Tracee Baru dua puluh tahun yang telah lalu.

Problem operatif berkenaan dengan Pancasila memperoleh jawaban mendasar di dalam bentuk penataan dan pengembangan yang bersifat konstitusional. Artinya ialah bahwa penataan dan pengembangan operasional, baik yang bersifat struktural maupun yang bersifat kultural, perlu melalui jalan konstitusional.

Problem tematik berkenaan dengan Pancasila yang secara tersirat telah selalu ada terkandung di dalam penataan struktural, menjadi makin tumbuh

pula melalui penataan kultural, yang juga dilakukan secara konstitusional, dalam bentuk Tap II/MPR/1978, Eka Prasetya Pancakarsa.

Problem pluri-interpretabilitas Pancasila telah pula memperoleh jawabannya secara mendasar. Konstitusi itu sendiri merupakan acuan tafsir Pancasila yang utama dan terutama. Tanpa mengesampingkan usaha intelektual kreatif di dalam pemahaman mengenai Pancasila, hal ini merupakan acuan yang amat penting. Dengan demikian maka tidak adalah apa yang dinamakan monopoli tafsir Pancasila yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini, adalah pemangku hak dan tanggung jawab terhadap tafsir Pancasila yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Dan ini terjadi melalui mekanisme konstitusional.

Problem tentang pendekatan theologis telah pula mendapatkan jawaban secara mendasar. Perjalanan selama dua dasawarsa ini makin memperjelas kedudukan agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam kehidupan bangsa dan negara Pancasila. Pancasila bukan agama, dan agama juga bukan Pancasila. Namun keduanya mempunyai titik temu, karena keduanya sama-sama mengandung nilai-nilai dasar kemanusiaan dan kebangsaan yang baik. Agama tidak mungkin di-Pancasila-kan dan Pancasila tidak mungkin pula diagamakan. Dengan berpegang kepada Pancasila itu, bangsa dan negara Indonesia tidak mengacu kepada sekularisme di satu pihak maupun mengacu kepada theokratisme keagamaan di lain pihak. Pancasila yang terdiri dari lima sila itu pun merupakan satu keutuhan yang manunggal-bulat. Bahkan di dalam hal ini kita melihat perkembangan-perkembangan yang amat membahagiakan dan menyegarkan: kerukunan hidup antara umat beragama dipacu, bahkan tumbuh pula pemikiran-pemikiran mendasar mengenai titik temu antara nilai-nilai dasar keagamaan dengan nilai-nilai dasar wawasan persatuan kesatuan kebangsaan berdasarkan Pancasila itu. Tumbuh gagasan mengenai kontekstualisme di dalam pengamalan kehidupan beragama, tumbuh gagasan mengenai nativisation of religion, tumbuh pula apa yang dinamakan Indonesianisasi theologi, yang sungguh-sungguh berbeda dengan apa yang dinamakan nasionalisasi dari agama-agama.

## TRANSFORMASI DARI PENDEKATAN STRUKTURAL KE PENDEKATAN KULTURAL

Sepenuhnya dapat dipahami mengapa jalan penataan dan pengembangan ideologi itu pada tahapan awalnya bertumpu terutama di dalam jalur struktural-institusional.

Perkembangan ini membawa kesan yang amat terasa bahwa pertumbuhan pemahaman ideologi tersebut lebih banyak berjalan di bidang politik formal dan kurang terasa pada jajaran politik non-formal.

Ketetapan MPR mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik, memberikan warna yang lebih jelas terjadinya proses pengembangan yang menyangkut jajaran infrastruktur politik, sebagai suatu jembatan yang memadukan pertumbuhan pengembangan ideologi di tataran kenegaraan dengan pertumbuhan pengembangan ideologi pada jajaran kemasyarakatan. Proses ini adalah amat penting, di mana dinamika dan kebhinnekaan di dalam kehidupan bangsa, yang terutama terjadi pada jajaran kemasyarakatan itu dapat tumbuh berkembang secara kreatif tanpa merusak persatuan kesatuan kebangsaan. Deviasi-deviasi terhadap Pancasila tidak hanya terjadi di tataran kenegaraan saja, akan tetapi dapat pula tumbuh dan terjadi pada jajaran kemasyarakatan.

Ekaprasetya Pancakarsa telah membuka cakrawala pengembangan ideologi tersebut melalui jalan kebudayaan, melalui jalan kultural. Dan proses ini memang amatlah penting. Pendekatan-pendekatan yang sifatnya struktural dapat terperangkap ke dalam apa yang oleh sementara kalangan disebut sebagai birokratisasi ideologi. Proses seperti ini dapat terperosok ke dalam suasana institusionalisasi yang menjadi membeku, tanpa elan dan dinamik, tanpa kreativitas dan kekuatan kritis-intelektual, dan dapat membawa perkembangan penghayatan dan pengamalan ideologi itu ke dalam sikap-sikap formalisme semata-mata, dan memacu tumbuhnya sikap-sikap minimalis.

Itulah sebabnya maka pertumbuhan pengembangan ideologi nasional kita ini perlu sekali mengalami suatu transformasi dari suasana struktural institusional ke dalam suasana kultural kemasyarakatan. Proses inilah yang kiranya perlu dipacu pertumbuhannya dengan baik. Sudah barang tentu dengan proses transformasi kultural ini tidak dimaksudkan untuk menghapus sama sekali pertumbuhan dan pengembangannya di bidang struktural institusional.

Sebetulnya ketetapan MPR yang menyatakan bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pengamalan Pancasila, sudah merintis era transformasi ini. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah hal kultural, dan diselenggarakan melalui jalan-jalan kultural pula.

#### RELEVANSI PASAL 32 UUD 1945

Terjadinya proses transformasi dari suasana struktural institusional memasuki suasana kultural di masa yang akan datang ini membawa pesan mengenai urgensi dan relevansinya pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia.

Sesungguhnya pembangunan kebudayaan itu pun sudah terjadi secara terus-menerus, karena kebudayaan itulah yang telah membuat bangsa Indonesia tumbuh sebagai bangsa pada zaman kebangkitan nasional, sampai kepada proklamasi kemerdekaan, selama perang kemerdekaan sampai kepada lahirnya Orde Baru hingga saat ini. Bahkan kebudayaan itulah kekuatan yang telah selalu *mengemban*i pertumbuhan masyarakat Nusantara di sepanjang sejarahnya sejak dari dahulu kalanya.

Namun perkembangan dan perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam kehidupan bangsa kita saat ini, yang tidak pula dapat kita lepaskan dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, yang akan mempunyai dampak dan implikasi terhadap perjalanan kebangsaan kita di masa mendatang, memang memerlukan pemikiran-pemikiran yang mendasar mengenai hidup kehidupan maupun penghidupan kebangsaan kita.

Relevansi dan urgensi pembangunan kebudayaan tersebut meminta kita untuk memberikan makna dan perhatian yang lebih besar kepada Pasal 32 UUD 1945. Di dalam pasal tersebut sesungguhnya terkandung suatu amanat yang sifatnya amat mendasar.

Pasal 32 UUD 1945 itu sendiri bunyinya adalah amat singkat dan sederhana: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pandangan yang mendasarinya terdapat di dalam Penjelasan yang berbunyi sebagai berikut: "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia." Sudah barang tentu pemahaman mengenai Pasal 32 ini pun tidak boleh lepas dari seluruh UUD 1945 sebagai konteks dasarnya.

Pokok pikiran pertama yang terkandung di dalam Pasal 32 ini adalah bahwa kebudayaan dipahami sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia. Dengan demikian menjadi jelas bahwa di dalam wawasan ini kebudayaan itu mencakup baik apa yang dinamakan kebudayaan batin (the culture of the spirit ataupun spiritual culture) maupun kebudayaan lahir (the culture of the matter atau the material culture). Pasal ini juga mengatakan bahwa usaha kebudayaan seperti itu harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain kebudayaan itu adalah dari manusia, oleh manusia, untuk manusia, dan kebangsaan Indonesia adalah suatu ungkapan dari kodrat alam kemanusiaan itu pula.

Pokok pikiran lain yang terkandung di dalam pasal ini adalah hal kebudayaan daerah. Banyak salah paham mengenai hal ini. Namun apabila kita mendalami pemikiran-pemikiran Ki Hadjar Dewantara, yang mempunyai saham yang besar di dalam perumusan Pasal 32 ini, jelaslah bahwa yang dimaksud di dalam pokok pikiran ini adalah pengakuan dan penegasan mengenai eksistensi kebudayaan di daerah-daerah sebagai modal dasarnya pembangunan kebudayaan bangsa Indonesia. Di dalam pokok pikiran ini pun terkandung suatu pengakuan kebhinnekaan dan ketunggalikaan sebagai sifat dasarnya masyarakat Indonesia: masyarakat Nusantara dan kebudayaan Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika merupakan acuan operasional yang perlu diperhatikan di dalam usaha membangun kebudayaan Indonesia yang berwawasan kebangsaan, berwawasan Nusantara. Pokok pikiran ketiga yang terkandung di dalam pasal ini adalah sikap kita bangsa Indonesia terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Kita tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain wawasan kebangsaan kita adalah wawasan kebangsaan terbuka terhadap elemen-elemen budaya asing sejauh itu menuju ke arah kemajuan adab, kemajuan budaya, persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain wawasan ini adalah wawasan akulturasi.

Hal ini pun memberikan petunjuk yang amat jelas betapa Pancasila sebagai ideologi itu adalah suatu tipe ideologi terbuka, yang meminta tumbuh dan berkembangnya kreativitas kultural. Menurut Ki Hadjar Dewantara: kebudayaan tidak lain daripada berkembangnya kodrat alam kemanusiaan dan kodrat alam kebangsaan kita di sepanjang jalannya alam dan zaman. Kodrat alam yang diciptakan oleh Tuhan ini pun bukanlah kenyataan yang statis, yang sudah purna, melainkan kodrat alam yang evolutif, tumbuh, berkembang dan bergerak terus-menerus. Untuk itu kepada kita diminta untuk dapat membaca perputaran dan perkembangannya alam dan zaman secara terus-menerus, dengan menyadari dalil *konsentrisitas*, *konvergensi* dan *kontinuitas*.

Kemampuan mengadakan akulturasi memang merupakan daya budaya yang amat mewarnai sejarah kebudayaan yang terjadi di dalam masyarakat Nusantara ini. Kemampuan untuk berakulturasi merupakan salah satu kekuatan kultural kita.

Namun pada saat ini kita menghadapi tantangan yang amat besar. Dari satu pihak kita masih harus melanjutkan proses akulturasi dari masa lampau yang belum menemukan bentuk yang mantap, dari lain pihak kita dihadapkan kepada tugas akulturasi baru, yaitu akulturasi dengan perkembangan kebuda-



yaan dan peradaban dunia, di mana ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan unsur-unsur yang amat menentukan. Kita ditantang untuk dapat membuat ekonomi, teknologi dan pengetahuan itu menjadi perangkat budaya yang berwawasan kebangsaan kita. Di dalam wawasan seperti ini menjadi jelas pula bahwa pembangunan ekonomi, pengembangan teknologi maupun pengembangan ilmu pengetahuan harus kita pandang sebagai hal kebudayaan. Dengan demikian maka usaha akulturasi ini tidak akan meninggalkan dasar-dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## PENDIDIKAN

Terkait dengan pembangunan kebudayaan tersebut, menjadi jelas betapa pembangunan pendidikan nasional merupakan hal yang amat vital dan mendasar. Dengan pendidikan itu dibangunlah sumber daya manusia sebagai potensi kultural potensial menjadi potensi kultural yang nyata.

Pembangunan sistem pendidikan nasional di dalam perkembangan kebudayaan dewasa ini harus sungguh-sungguh memperhitungkan faktor relevansi: baik itu relevansi terhadap ideologi kebangsaan kita, yaitu Pancasila; relevansi terhadap dimensi kuantitatif maupun dimensi kualitatif dari potensi demografik Indonesia; relevansi terhadap alam Nusantara dan tantangan perkembangan internasional; relevansi terhadap pembangunan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan pertahanan keamanan. Dengan memperhitungkan secara mendasar relevansi sebagai faktor, perlulah ditetapkan prinsip-prinsip pokok dari pembangunan sistem pendidikan nasional kita. Kita membangun sistem pendidikan sebagai usaha kebudayaan yang berwawasan kebangsaan, berwawasan kemajuan, berwawasan nusantara: sistem yang sifatnya nasional, demokratis dan memberikan kemampuan kepada bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjalanan sejarahnya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat dan maju.

## KERANGKA LANDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Adalah perkembangan sejarah itu sendiri yang telah membawa bangsa Indonesia, selama dua dasawarsa Orde Baru ini, mencapai momentum untuk membangun apa yang disebut sebagai kerangka landasan pembangunan nasional tersebut. Kebetulan pula hal ini sejalan pula dengan saat di mana kita berada di dalam suasana transformasi dari suasana struktural institusional mema-

suki fase kultural. Dan ini pula maknanya apabila pembangunan dinyatakan sebagai pengamalan Pancasila.

Kerangka landasan adalah hal yang amat strategis melewati mana bangsa Indonesia akan melanjutkan perjalanannya memasuki abad ke-21 sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu dan maju.

Bahwa usaha besar meletakkan kerangka landasan pembangunan ini jatuh bertepatan dengan situasi ekonomi yang memprihatinkan dan serba rumit, hal itu pun tampaknya mempunyai hikmahnya tersendiri. Membangun kerangka landasan yang kuat di dalam suasana kesempitan dan keprihatinan membuat kita untuk tidak terperangkap ke dalam ilusi-ilusi, melainkan berpijak dalam realisme kejuangan, yang menuntut pemikiran yang lebih tajam, kerja yang lebih keras, ketekunan dan kecermatan yang lebih gigih, serta etika yang menuntut aktualisasi dari kebersamaan dan solidaritas. Peranan Pancasila, sebagai ideologi, yaitu pegangan perjuangan persatuan kesatuan kebangsaan kita, dengan demikian juga menjadi amat mendasar pula.

Persatuan kesatuan kebangsaan telah memacu terjadinya kebangkitan nasional. Wawasan kebangsaan telah melahirkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Pada zaman perang kemerdekaan persatuan kesatuan kebangsaan telah menjadi kekuatan batin untuk tetap bertahan sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Pada saat dilanda dan digoda untuk berbedabeda dan terpilah-pilah, wawasan kebangsaan mengamanatkan bahwa persatuan kesatuan itu jauh lebih berharga daripada keterpecahan dan kehancuran. Pada saat kesempitan dan keprihatinan seperti yang kita alami di dalam tahap perjuangan kebangsaan kita saat ini, wawasan kebangsaan mengamanatkan bahwa pembangunan ini adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dan menghayati serta mengamalkan petuah lama *berat sama dipikul ringan sama dijinjing*.

## BEBERAPA TANTANGAN DI MASA MENDATANG

Keberhasilan pembangunan selama dua dasawarsa ini tidak berarti bahwa perjalanan di masa yang akan datang nanti akan menjadi tanpa tantangan serta gangguan-gangguan. Demikian pula halnya dengan keberhasilan kita di dalam mengadakan penataan dan pengembangan ideologi kita. Tantangan-tantangan itu dapat terjadi karena adanya faktor internal ataupun faktor eksternal, atau gabungan dari keduanya, yang selalu mengandung potensi untuk membuka terjadinya deviasi-deviasi ideologi.

Namun deviasi itu pun terutama dan pertama-tama yang paling mungkin justru timbul dari diri kita masing-masing sebagai bagian dari satu kehidupan.

kebangsaan ini. Itulah sebabnya maka Presiden Soeharto di dalam amanat kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1985 yang lalu memberikan peringatan berikut ini.

Walaupun begitu, kita tidak pernah boleh meninggalkan kewaspadaan. Bahkan harus selalu mawas diri dan mengkonsolidasikan diri baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam ... bahaya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja akan datang dari luar atau dari ideologi atau paham lain, akan tetapi bisa datang dari diri kita sendiri jika kita tidak mengamalkan dengan penuh kesungguhan, kejujuran dan keikhlasan.

Perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, termasuk di dalamnya pengumpulan dan percaturan dari berbagai macam perjuangan dan kepentingan, akan selalu dapat membawa implikasi ideologis di dalam perjalanan kebangsaan kita di masa yang akan datang.

Tidak mustahil pula penyakit-penyakit lama yang pernah melanda kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan kita, kambuh dan muncul kembali.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bhinneka tunggal ika. Salah satu kecenderungan yang tidak mustahil akan memacu terjadinya problem ideologis adalah sikap *satu dimensional* yang deterministik dan mutlak-mutlakan. *One-dimensionalism* itu dapat memacu tumbuhnya sikap dan perilaku yang *totaliter deterministik*, dapat pula memacu tumbuhnya sikap dan perilaku yang *liberal anarkistik*. Tidak mengherankan apabila di dalam bayangannya suasana seperti ini terjadi pertanyaan: apakah Pancasila itu ideologi yang tertutup ataukah Pancasila itu ideologi yang terbuka, sebagaimana pada masa yang telah lalu orang memperdebatkan pula sekitar: apakah Pancasila itu wadah ataukah Pancasila itu isi. Pemahaman mendasar mengenai Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila adalah suatu tipe ideologi terbuka: ia tidak menjadi monopoli dari sekelompok atau segolongan orang, karena ia adalah tumbuh dan terjadi serta digali dari struktur maupun budayanya masyarakat Nusantara; ia adalah milik bangsa Indonesia. Pancasila juga terbuka dalam arti tidak menutup diri terhadap segala hal dan nilai-nilai yang baik dari luar. Namun keterbukaan Pancasila ini tidaklah berarti keterbukaan yang tanpa acuan, yang anarkistik, yang akan justru menjadikan masyarakat Nusantara menjadi lepas dari sifat dasarnya.

Situasi seperti itu tidak mustahil terjadi disebabkan oleh terjadinya proses pembangunan ini sendiri, baik ditinjau dari hasil-hasilnya maupun dari akibat-akibat sampingan yang dibawanya. Pembangunan yang akan membawa perubahan-perubahan alam maupun kemasyarakatan, yang akan memacu tumbuhnya kecerdasan dan kesejahteraan, akan membawa serta permasalahan-permasalahannya, baik di bidang kemasyarakatan, sosial ekonomi

maupun politik dan keamanan. Inilah artinya bahwa dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, tidaklah berarti bahwa *era-pasca-satu-asas* itu menjadi sejarah yang tanpa permasalahan.

Dengan berpegang kepada Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi, kita mempunyai pedoman sikap dan wawasan untuk menghadapi problem masa depan tersebut. Pancasila sebagai dasar negara membawa amanat bahwa proses pembangunan dengan segala perubahan dan permasalahannya itu hendaklah tetap berjalan di atas Konstitusi Negara Kebangsaan kita. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memberi pesan bahwa perjalanan di masa yang akan datang dengan berbagai masalah dan kemungkinannya itu, tetaplah harus lewat melalui jalan kebudayaan: tidak meninggalkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi, yaitu pegangan perjuangan kebangsaan kita, memberi amanat bahwa kita harus tetap teguh berjuang memenangkan pergumulan kita dengan masalah-masalah dan kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang, sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu dan maju. Untuk ini tugas akulturasi menjadi amat penting dan menentukan. Kita harus mampu mengambil elemen-elemen baru, berpegang kepada wawasan kebangsaan, wawasan kemajuan dan wawasan Nusantara.

Whatever the case, if in attempting to solve their great postrevolutionary problems the Indonesian people were able to demonstrate the same qualities which they had shown in their struggle for political independence, their chances of success appeared strong.

Kualitas manusia Indonesia, itulah yang akan menentukan. Kebangkitan Nasional telah mengungkapkan kualitas manusia Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan telah pula menunjukkan adanya kualitas manusia Indonesia. Orde Baru selama dua dasawarsa ini telah pula menunjukkan kualitas manusia di dalam perjuangannya. Di masa yang akan datang, baik jangka dekat maupun jangka panjang, optimisme dan kepercayaan selalu ada bahwa bangsa Indonesia akan tetap memiliki kualitas perjuangan manusia Indonesia, asal saja mau mengemban tugas sejarahnya di masa mendatang bersatu di dalam satu wawasan kebangsaan, dan tumbuh dengan wawasan kemajuan.